## SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Dana Perbaikan Rutilahu Disalurkan

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.10
Edisi : Sabtu, 8 September 2018

## Dana Perbaikan Rutilahu Disalurkan

CIMAHI, (PR).-

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan anggaran bersumber dari Bantuan Provinsi Jabar dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk warga Kota Cimahi tahun 2018 mulai disalurkan. Bantuan bersifat stimulan tersebut bisa memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan kerja sama dan swadaya masyarakat.

Total bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga Cimahi pada tahun 2018 sebanyak 1.490 unit. Jumlah bantuan provinsi untuk rumah tidak layak huni sebanyak 750 unit, sedangkan BSPS berjumlah 405 unit.

Sebelumnya, Kota Cimahi telah menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni dengan sumber APBD Kota Cimahi 2018 untuk 335 unit yang terdiri atas 300 unit untuk perbaikan rutilahu reguler, 15 unit untuk program Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR), 10 unit untuk program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan 10 unit untuk kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS). Untuk APBD Perubahan 2018 akan ada tambahan 30 unit bantuan rumah

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengatakan, tantangan dalam penyediaan perumahan saat ini, di antaranya jumlah rumah tidak layak huni yang terus meningkat di Kota Cimahi.

"Hal ini dapat menimbulkan terjadinya perumahan kumuh jika tidak dicegah atau di-kendalikan. Maka, bantuan perbaikan lewat bantuan provinsi dan BSPS sangat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni," ujar Ajay, Kamis (6/9/2018).

Pemerintah pusat melalui Direktorat Rumah Swadaya dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan kegiatan BSPS yaitu stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni. Kriteria penerima bantuan, sasaran bantuan dan mekanisme pemberian bantuan stimulan ini diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016.

Tujuan dari perbaikan rumah tidak layak huni di antaranya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat

"Membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni, menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih, serta menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan karena program harus dilakukan secara swadaya oleh masyarakat," tuturnya.

Mengimplementasikan hal tersebut, memerlukan serangkaian proses yang panjang. "Mulai dari usulan, verifikasi administrasi dan lapangan, sampai pada pelaksanaannya di masyarakat," katanya.

Pihaknya berharap masyarakat yang menjadi penerima manfaat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan tersebut. "Laksanakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Syukuri bantuan ini sebagai salah satu perwujudan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Pada pelaksana pembangunan, kami mohon dapat melaksanakan sesuai kaidah sehingga rumah menjadi layak huni dan terjamin keselamatan penghuninya, toko penyedia barang jasa juga memberikan barang dengan kualitas terbaik, sesuai perjanjian kerja sama. Diharapkan bantuan stimulan mendorong percepatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota

## SUBBAG. U. IAS DAN TATA USAHA

BPK REFERM kilan Provinsi Jawa Barat

## Verifikasi ulang

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi Muhammad Nur Kuswandana menambahkan, mekanisme ban-tuan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kota Cimahi dan Banprov Jabar serta BSPS sama. "Data rutilahu yang ada di DPKP diverifikasi ulang oleh petugas ke lapangan. Mereka sudah bekerja sejak Mei dan setelah didapat data sesuai dengan kriteria maka penerima manfaat dicantumkan dalam surat keputusan Banprov Jabar maupun pemerintah pusat melalui kementerian," ujarnya.

Besaran nilai bantuan mencapai Rp 15 juta. Untuk BSPS, nilai Rp 12,5 juta dipakai untuk material dan sisanya upah, sedangkan pada APBD Kota Cimahi nilai upah mencapai

Rp 5 juta.

"Untuk besaran nilai bantuan sama agar tidak menimbulkan kecemburuan, memang besarannya tidak mencukupi kebutuhan karena sifatnya stimulan. Maka, harus dibantu swadaya masyarakat agar menjadi layak huni," ucapnya.

Pihaknya memperkirakan, masih tersisa sekitar 1.400-1.500 rumah tidak layak huni di Kota Cimahi. Data setiap terus bertambah karena kualitas hunian menurun.

"Terutama, di kawasan permukiman kumuh kebanyakan kualitas bangunan dan material rendah sehingga tidak tahan lama. Bisa jadi secara visual masih layak, tetapi ternyata kayu-kayu hingga atap sudah lapuk. Ada beberapa yang belum turun bantuan sudah ambruk," katanya.

DPKP Kota Cimahi memastikan data penerima bantuan untuk rumah tidak layak huni merupakan pengajuan berjenjang dari wilayah. "Untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh konsultan pihak ketiga. Kami menggunakan data yang diajukan berjenjang dari kelurahan dikoordinasikan RT-

RW," katanya

Tiap tahun Pemkot Cimahi terus menganggarkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pihaknya juga berharap Pemprov Jabar dan pemerintah pusat turut membantu mengentaskan rumah tidak layak huni. "Pemerintah sangat peduli dalam mengentaskan rutilahu. Melihat ketersediaan anggaran, masyarakat diharap bersabar dan semoga dapat membangkitkan jiwa gotong royong masyarakat untuk menyelesaikan rumah yang direhab hingga layak huni," tuturnya. (Ririn